



**UNITED NATIONS
COLLABORATIVE PROGRAMME ON
REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND
FOREST DEGRADATION**

Siaran Pers

Jakarta, 13 Januari, 2011

Konsensus FPIC Memastikan Kesuksesan Implementasi REDD+ di Indonesia

Jakarta, Dewan Kehutanan Nasional, dengan dukungan UN-REDD Programme Indonesia menyelenggarakan lokakarya selama dua hari untuk membahas konsep Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior and Informed Consent*) di Hotel Santika, Jakarta (11/01/11 – 12/01/11). Lokakarya ini dibuka oleh Kuntoro Mangkusubroto sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) REDD+ dan Hadi Daryanto selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (RI). Dengan keseriusan Indonesia dalam upaya-upaya aktif menurunkan kadar emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan, kini semakin jelas bahwa proses pemangku kepentingan multipihak adalah unsur kunci untuk pelaksanaan REDD+ yang transparan, adil, dan demokratis.

Dewan Kehutanan Nasional sebagai salah satu badan komisi yang bertanggung jawab atas topik terkait, merasa perlu mendengarkan berbagai pihak yang terkena dampak pelaksanaan REDD+. Untuk itulah 5 (lima) kamar masyarakat diundang menghadiri lokakarya dua hari ini. Mereka adalah Masyarakat/komunitas lokal, Pemerintah, Sektor Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kerja Sama Internasional, serta Akademisi. Kamar-kamar ini duduk bersama, mengemukakan persepsi mereka, dan berbagi masukan dalam rangka mencapai konsensus konsep FPIC terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan bangsa yang beragam budayanya.

Oleh sebab itulah konsep FPIC perlu disepakati dengan cara menyelaraskan pengalaman-pengalaman dan keahlian kamar-kamar yang berbeda. “Saya sangat mendukung lokakarya semacam ini karena saya paham bahwa kita perlu mendengar suara masyarakat secara langsung. Mereka—khususnya yang tinggal di sekitar dan dalam kawasan hutan—adalah yang paling mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Merekalah yang tahu apa yang mereka butuhkan, sehingga kita harus meminta persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari mereka sebelum melaksanakan proyek REDD+ apa pun,” tegas Kuntoro di pidato pembukanya. Kuntoro menambahkan bahwa FPIC adalah unsur penting yang memastikan kesuksesan pelaksanaan REDD+ di Indonesia

Peserta dari kamar-kamar yang berbeda setuju bahwa FPIC dalam hal ini adalah unsur dasar yang merupakan penerapan hak asasi manusia. Masyarakat berhak memahami situasi yang mereka hadapi dan menentukan nasib mereka dengan menggunakan informasi awal yang mereka dapatkan. Kamar-kamar masyarakat itu kemudian berkumpul dalam diskusi kelompok untuk berbagi pengalaman (*best practices*) untuk diformulasikan menjadi konsep FPIC yang dapat



**UNITED NATIONS
COLLABORATIVE PROGRAMME ON
REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND
FOREST DEGRADATION**

dipahami awam dan mampu mencegah konflik potensial yang dapat terjadi antara masyarakat dan pemrakarsa proyek REDD+ di masa mendatang.

UN-REDD Programme Indonesia

UN-REDD Programme Indonesia adalah kerja sama inisiatif antara Kementerian Kehutanan RI, Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Environment Programme (UNEP). Program ini bertujuan membantu dan mendukung pemerintah RI untuk secara bertahap membangun arsitektur REDD+ yang memungkinkan pelaksanaan REDD+ yang adil, setara, dan transparan, juga untuk mencapai kesiapan REDD+. Badan-badan Persekutuan Bangsa-bangsa (PBB) ini menggunakan pendekatan terkoordinasi dalam program UN-REDD, dengan memanfaatkan beragam kompetensi dari badan-badan PBB yang berbeda untuk mencapai satu tujuan. UN-REDD Programme Indonesia mengadakan peluncuran programnya di Sulawesi Tengah pada tanggal 13 Oktober 2010 setelah berdasarkan Kriteria Seleksi Provinsi Percontohan dan masukan pemangku kepentingan multipihak, provinsi tersebut terpilih menjadi Provinsi Percontohan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Laksmi Banowati (National Project Manager)
Hp. +62-815928124

Abdul Wahib Situmorang (Team Leader for Multi Stakeholder Process & National Consensus)
Hp. +62-8164804449

UN-REDD Programme Indonesia
Manggala Wanabakti Blok IV 5th Fl., Suite 525C
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Indonesia
tel. +62-21 570 3246
fax. +62-21 574 6748